



► PENATAAN KAWASAN

Pemkot Kurangi Kawasan Kumuh

UMBULHARJO-
Pemkot Jogja memulai
program pengurangan
kawasan permukiman
kumuh di area
perkotaan. Program
ini diawali dengan
pembentukan kelompok
kerja Perumahan
Kawasan Permukiman
(Pokja PKP).

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Ketua Pokja PKP Kota
 Jogja, Agus Tri Haryono

- Wilayah yang mengalami pengurangan paling signifikan yakni Gondokusuman.
- Forum PKP tidak hanya urusan teknis namun juga masyarakat merasakan manfaat dari PKP.

menyampaikan, dibentuknya Pokja PKP berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Agus menjelaskan nantinya Pokja PKP berfungsi untuk memfasilitasi Forum PKP serta menjadi wadah untuk mempertemukan sampai membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP dengan melibatkan peran masyarakat di dalamnya. Selain itu, juga memberikan masukan kepada pemerintah kota.

"Salah satu isu strategis PKP di Kota Jogja adalah permukiman kumuh yang sebenarnya di dalamnya sudah mencakup isu strategis lainnya yaitu akses air minum aman, sanitasi layak dan aman serta

permasalahan sampah," ucap Agus, Minggu (29/5).

Menurutnya, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2021 telah berhasil melakukan pengurangan kawasan kumuh seluas 20,54 hektare. Pengurangan tersebut merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi antara Pemkot Jogja dan Kotaku. Di antaranya Gondokusuman, Umbulharjo, Gondomanan, dan Tegalrejo.

"Wilayah yang mengalami pengurangan paling signifikan yakni Gondokusuman dengan kawasan kumuh seluas 10 hektare lebih menjadi empat hektare lebih," ungkapnya.

Siap Merumuskan
 Sekretaris Daerah (Sekda)

Kota Jogja, Aman Yuridijaya menjelaskan dalam menjadi mitra Pokja PKP, forum PKP akan siap untuk merumuskan dan melaksanakannya.

Selain itu juga mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan aspek perumahan dan permukiman yang nantinya pasti akan berhimpitan dengan sanitasi, persampahan, pertanahan, jalan lingkungan dan aspek-aspek lain.

"Forum PKP tidak hanya urusan teknis namun juga masyarakat merasakan manfaat dari PKP itu sendiri," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005